PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

Agnes Sutarnio¹, Welly Winarto²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Tesis ini membahas penerapan Diversion tindakan kriminal pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi Diversi dari pelanggaran pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi data sekunder berupa dokumen hukum dengan pendekatan kasus, dengan menganalisis beberapa dokumen hukum, terutama yang berkaitan dengan Diversion.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pengalihan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 178 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 karena terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan dalam bentuk dakwaan tunggal. Hakim harus mampu menganalisis dan membedakan kejahatan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dilakukan pengalihan pelaksanaan. Dalam kasus pelanggaran pidana tidak dapat dilakukan Diversion, *judgestake* mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam keputusan, sehingga ancaman hukuman penjara sebagai alternatif terakhir yang dapat diterapkan pada anak-anak.

Kata Kunci: diversi, tindak pidana pencurian, anak

ABSTRACT

This thesis discusses the application of Diversion the criminal acts of theft committed by minors. This study aims to identify and analyze the application Diversion of the offenses of theft committed by minors. The method used in this research is a normative legal research methods, the study of secondary data in the form of legal documents by case approach, by analyzing some of the legal documents, especially those relating to Diversion.

*The results showed that the judge in applying Diversion to the defendant in the Makassar District Court Decision No. 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks incorrect and not in accordance with Article 7 paragraph (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 because the defendant was charged with Article 363 paragraph (1) Ke-4 KUHP and in the form of a single indictment. Judges should be able to analyze and distinguish the crime of which can and which can't be pursued implementation Diversion. In the case of a criminal offense can't be pursued Diversion, *judgestake* into account the best interests of children in decisions, so the threat of imprisonment as a last alternative that can be applied to children.*

Keywords: diversion, crime of theft, child

PENDAHULUAN

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa, apabila berhadapan dengan hukum. Untuk itu secara paradigma model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sama dengan penanganan orang dewasa dengan model "retributive justice" yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Setelah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari UU No. 3 Tahun 1997, maka secara signifikan mengalami perubahan dengan mengedepankan model "*restorative justice*" yaitu mengedepankan pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir. Dalam konteks ini, model *restorative justice* mendahulukan cara lain sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana yang dikenal dengan cara "diversi". Lembaga diversi menjadi solusi atau jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan tindak pidana anak. Penerapan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari penangkapan, penyelidikan/ penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian urgensi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum secara tepat dan komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan *restorative justice*.

Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Contoh kasus anak yang melalui proses diversi yaitu pencurian terhadap barang 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh M. Husain Alwi Syihab alias Husain (17) dan M. Haiqal Wintara Syihab alias Haiqal (16), Minggu (19/7/2015) di pelataran Parkir Hotel Amaris Jl. Hertasning, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Para terdakwa dalam kasus tersebut didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP tentang pencurian dengan kualifikasi pemberatan, dimana ancaman pidana dalam ketentuan pasal tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penyelesaian dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan *restorative justice* dan upaya diversi dimana penyelesaian dilakukan di luar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari penelusuran dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan cara menganalisis beberapa dokumen hukum. Data sekunder yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Oleh karena itu, menurut M. Nasir Djamil (2012:137), tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

2. Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 menyatakan: Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

4. Proses Pelaksanaan Diversi

Proses Diversi tercantum dalam Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:225), pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pen" dan akhiran "an" yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

2. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 pada Pasal 69 sampai Pasal

83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan, yang terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Menurut Nandang Sambas (2013:5), karena adanya berbagai kepentingan yang berhak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

2. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Menurut D. Y. Atta (1979:43), di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat melainkan anak-anak nakal saja (*juvenile delinquency*). Kartini Kartono (1998:6) mengemukakan *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala-gejala sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk perilaku yang menyimpang.

Menurut Romli Atmasasmita (1983:17) istilah *delinquency* tidak identik dengan kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Soedjono Dirdjosisworo (1983:150), mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar,

yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

3. Faktor-faktor Kenakalan Anak

Menurut Marlina (2009:59-60), masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambalnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbakan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi delinquency. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang warisan, pengaruh kebiasaan; teori psikologi, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan di mana seseorang itu berada, teori control, teori lower class, dan teori differential culture (teori penyimpangan kebudayaan).

4. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2002:3), seorang anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Maidin Gultom (2006:39), mengemukakan empat prinsip perlindungan anak sebagai berikut:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat mempunyai kepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak hambatan.

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

D. **Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak menurut Setya Wahyudi (2011:35), merupakan terjemahan dari

istilah *The Juvenile System*, yaitu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan

Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

1. Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 05.00 Wita di pelataran Parkir Hotel Amaris Jl. Hertasning Kec. Panakkukang Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/type Yamaha MIO Sporty Jenis/Model SPD Motor Nomor Polisi DD 2352 LU Warna Putih, Tahun Pembuatan 2011, dengan Nomor Rangka MH328D40DBJ463992, Nomor Mesin: 28D-3463961, milik Sdra. SUKWAN yang diduga dilakukan oleh Sdra. ADAMARYA Alias ADAM, Sdra. M. HUSAIN ALWI SYIHAB Alias HUSAIN dan Sdra. M. HAIQAL WINTARA SYIHAB yang mengakibatkan korban atas nama Sdra. SUKWAN mengalami kerugian Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa M. HUSAIN ALWI SYIHAB dan M. HAIQAL WINTARA SYIHAB serta ADAMARYA. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar

Membaca surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks Tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa M. HUSAIN ALWI SYIHAB, CS.;
2. Pelimpahan perkara dari A. ZULKARNAEN, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar tanggal 14 Agustus 2015, Nomor : B-614/R.4.10/Ep.2/08/2015 atas nama terdakwa M. HUSAIN ALWI SYIHAB, CS.; Mengingat Pasal 152 KUHP (UU. No. 8 Tahun 1981) ;

MENETAPKAN

1. Menentukan hari sidang pada hari RABU tanggal 19 AGUSTUS 2015 pukul 09.00 wita;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Makassar untuk menghadapkan terdakwa M. HUSAIN ALWI SYIHAB, CS.; berikut saksi-saksi dan pendamping dari BAPAS Makassar dengan membawa barang bukti seperti yang terlampir dalam berkas tersebut.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Diversi Terhadap

Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor 178/Pid. Sus-Anak/2015/PN.Mks)

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012. Laporan tersebut bertujuan agar Hakim dapat memperoleh data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan sehingga diharapkan hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 menyatakan:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
 - (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
 - (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
 - (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Diversi
- Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 19 Agustus 2015 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 19 Agustus 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Terdakwa dan keluarga Terdakwa sepakat untuk saling memaafkan dengan Korban;
 2. Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian Korban;
 3. Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila tidak mematuhi pernyataan ini;
 - Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;
 - Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

 1. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
 2. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
 3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
 4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan saksi.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Diversi
- Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 19 Agustus 2015 antara Anak dan Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 19 Agustus 2015;
 - Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Diversi telah berhasil, maka pemeriksaan atas nama Terdakwa I. M. HUSAIN ALWI SYIHAB; Terdakwa II. M. HAIQAL WINTARA SYIHAB harus dihentikan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;
 - Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

 - Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. atas nama Terdakwa I. M. HUSAIN ALWI SYIHAB; Terdakwa II. M. HAIQAL WINTARA SYIHAB;
 - Memerintahkan Terdakwa I. M. HUSAIN ALWI SYIHAB; Terdakwa II. M. HAIQAL WINTARA SYIHAB, segera dikeluarkan dari tahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Pol. DD 2352 LU (DD 2028 XX) warna putih dengan No. Rangka MH328D40DBJ463992, No. Mesin 28D-3463961. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban Sdr. Sukwan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan No. Pol. DD 4370 YX (Plat putih) dengan No. Rangka MH1JBG111EK167245, No. Mesin JBG1E-1166888. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa M. Husain Alwi Syihab;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

4. Analisis Penetapan

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penerapan Diversi yang dilakukan oleh Hakim sebagaimana diuraikan di atas diperoleh gambaran bahwa Diversi yang diupayakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dimana Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam kasus perkara di atas terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dimana dalam pasal tersebut ancaman pidana penjaranya adalah paling lama 7 tahun. Demikian pun dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus perkara No. 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks., yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal.

Hakim haruslah dapat membedakan mana kasus pencurian yang dapat diupayakan diversi dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dapat diupayakan diversi.

Disamping itu, penerapan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Adapun dalam hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, hakim wajib mempertimbangkan dalam putusannya. Wajib dalam hal ini jika laporan kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Demikian tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012.

Hanya saja peneliti sependapat dengan hukuman berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuh untuk dididik dan dibina, karena terdakwa merupakan seorang Anak, terdakwa dan keluarga terdakwa telah berdamai dengan korban, dan bersedia mengganti kerugian korban. Kemudian hasil curian terdakwa juga dikembalikan kepada pemilik yang berhak. Disamping itu menurut peneliti, dalam kasus tersebut haruslah hakim juga memberikan peringatan kepada terdakwa agar dapat memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi kejahatan di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Isi penetapan Diversi No. 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh M. Husain Alwi Syihab dan M. Haiqal Wintara Syihab bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, Diversi disyaratkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam kasus tersebut terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Demikian pula dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 yang menyatakan Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal

Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), tetapi bentuk dakwaan dalam kasus perkara tersebut adalah dakwaan tunggal.

2. Adapun pertimbangan hakim dalam menerapkan Diversi terhadap terdakwa yakni karena adanya kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk saling memaafkan dengan Korban, dan bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Korban. Dari pertimbangan hakim tersebut, seharusnya dapat digunakan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Dari gambaran kasus di atas maka disarankan agar:

1. Hakim haruslah bisa menelaah dan membedakan tindak pidana mana yang dapat diupayakan pelaksanaan Diversi.
2. Dalam hal tindak pidana tidak dapat diupayakan Diversi, hakim tetap memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dalam menjatuhkan putusan khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir yang dapat diterapkan bagi Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- D.Y. Atta, 1979, Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Bina Cipta, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia), Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan.
- Kartini Kartono, 1998, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Armico, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.